

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan taerjemahnya (Surabaya: Fajar Mulya, 2015)

Buku

- Andrianto.2007. Good E-Goverment transparansi, akuntabilitas, publik melalui egovernment. Malang: Banyumedia Publishing.
- Altarazhi Bramantio Widhi.2014. *Efektivitas Layanan E-Catalogue Oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP)*.
- Gebi Ajeng Arum.2019. Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Procuremnt Di Kabupaten Luwu Utara.
- Helaludin & Hengki Wijaya.2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*, (Sekolah Tinggi Theolgia Jaffray.
- Hussein Elasrag.2010. *Islamic Finance: New Issues And Steps Forward*. London: Hussein Elasrag.
- Muhammad Iqbal.2014. *Fiqih Siyasah Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhaimim. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Muhammad Ali Al Shabuni.2010. *Shafwatu Al Tafasir*. Kairo: Dar Al Shabuni.
- Petter Mahmud Marzuki.2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ratih Juwit. 2020. *Studi Empiris Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Dalam Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Sanapia Faisal. 2005. *Format-Fromat Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.

Jurnal

- Andi Nur Riqqah Maulana, Andriana Mustafa. Peran LPI-PJB Terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Kecamatan Rappocini Kota Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syariayyah*. 2 (3): 1
- Michael Nelsen Lumintang, Vecky A.J. Masinambow, and Een N. Walewangko, "Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Di Lpse Kabupaten Minahasa Tenggara," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21 (1): 105–121,
- M. Taufiq, Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5 (2): 90-91
- Muzaki, Muhamad Shulkhan; Manar, Dzunuwanus Ghulam. Pengelolaan Laporan Hendi Di Kota Semarang Tahun 2017 Kajian Sumber Daya Kebijakan. *Journal Of Politic And Government Studies*, 7 (2): 351

- N M S Pratisthita and I G N Wairocana, “Penyalahgunaan Wewenang Pada Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi,” *Journal Ilmu Hukum* 7 (8): 1–16.
- Lia Muliawaty, Shofwan Hendryawan “Peranan E-Government dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, 11 (2): 105
- Saifuddin, Hadis-Hadis Pemberantasan Korupsi: Studi Kontekstual Kasus Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Az Zarqa* , 9 (2): 261
- Senator Nur Bahagia, Senarai Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, *Jurnal Pengadaan*, 1 (1): 6-13
- Sosiawan, Edwi Arief, Tantangan dan Hambatan dalam Implementasi E-Government di Indonesia, *Jurnal Semnasif*, 1 (5): 34
- Solehuddin Harahap, Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 5 (2): 113
- Syalom, Ismail, Welly “Efektivitas Pelayanan Publik Melalui Penerapan Electronic Government di Dinas Pendidikan Kota Tomohon”, *Jurnal Governance*, 1 (1): 5
- Widya Nengsih, M. Fachri Adam, Fitro Eriyanti “ Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kelurahan Alai Parak Kota Padang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2 (1):3
- Yanuar siswo Nugroho, “ Akuntabilitas Publik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Riset Manajemen*, 6 (2) : 119

Peraturan Presiden

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Pasal 73 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah

Peraturan Pemerintah

- Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia
- Pasal 5 Peraturan Lembaga Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
- Pasal 7 A Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintahan

Skripsi

- Annisa Putri Hadinata, “Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berbasis Amanah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (Lpse) Kota Makassar),” *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar*, 2022.

- Amelia Rahma, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi Di Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” *Skripsi, UIN RIL*, 2022.
- Fina Nur Aisyah, “ Akuntabilitas dan Partisipasi Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa(APBDES) Di Desa Tlogosari Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso” *Skripsi Akuntansi, Program Strata 1*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Rahma Armelia, “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Transparansi Anggaran Pembangunan Desa (Studi d Pekon Balak Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)” *Skripsi Syariah, Program Strata 1*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.
- Sahrul Gunawan, “Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bulukumba” *Skripsi Ilmu Pemerintahan*.2019.

Tesis

- Fandrito, Pria Kurnia, “Studi Kesiapan Perusahaan Konstruksi dalam Penerapan E-Procurement di Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan”, Thesis Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018., hal. 17

Internet

LPSE Tulungagung, “Profil”

<https://lpse.tulungagung.go.id/eproc4/publik/tentangkami#:~:text=Dasar%20hukum%20pembentukan%20LPSE%20adalah,Unit%20Kerja%20Pengadaan%20Barang%2FJasa>. Diakses pada 26 Maret 2024

Pasha Yudha Ernowo, “21 Persen Perkara Korupsi Berasal Dari Sektor PengadaanBarang dan Jasa”, <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/725314/21-persen-perkara-korupsi-berasal-dari-sektor-pengadaan-barang-dan-jasa>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2024

Kominfo LPSE “Layanan Pengadaan Secara Elektronik”, <https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/publik/tentangkami>, diakses 31 Mei 2024

Kamal, “Pengertian Akuntabilitas: Aspek, Manfaat, Tingkatan, Dimensi, dan Mekanisme”, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-akuntabilitas/>, Diakses 16 Juni 2024

Layanan Pengadaan Secara Elektronik, “LPSE Tulungagung”

<https://lpse.tulungagung.go.id/eproc4/>, diakses pada 18 April 2024

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, “Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik”, *Rapat Kerja Nasional LPSE Labuan Bajo*, 26 Juli 2016, hal. 33